

KEWASPADAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KEPADA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN SAMOSIR

Oleh :

Prietsaweny Riris T. Simamora ¹⁾

Jourdan Ricky P Tamba ²⁾

Elma Sandoa Surbakti ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1, 2, 3)}

E- mail :

wenny.debataraja@gmail.com ¹⁾

jourdan@gmail.com ²⁾

sandoa@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The paper aims at describing and analyzing BPBD Alertness to disasters in Samosir Regency and to determine the inhibiting factors for Regional Disaster Management in Samosir Regency. This research belongs to the type of descriptive research with a qualitative approach. The data comes from interview scripts, field notes, photos, videotapes, personal documents, notes or memos and other official documents. The results obtained indicate that several efforts made by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Samosir Regency have been running well. The inhibiting factors for BPBD in disaster management that occurred in Samosir Regency are (a) Lack of funds from the government so that disaster management is usually less effective and slow to be handled by the BPBD government (b) Lack of available tools at BPBD agencies when carrying out assistance in the event of a disaster (c) Lack of human resources or personnel in the field of vigilance.

Keywords: *BPBD Alertness for Disaster Management*

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Kewaspadaan BPBD kepada bencana di Kabupaten Samosir dan untuk mengetahui faktor penghambat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data tersebut berasal dari naskah wawancara catatan lapangan foto videotape dokumen pribadi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa beberapa usaha yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir sudah berjalan dengan baik usaha-usaha BPBD Kabupaten Samosir adalah dalam penanggulangan bencana yaitu: (a) Sosialisasi (b) Kontinjensi dan (3) Gladi Lapang. Faktor penghambat BPBD dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Samosir yaitu (a) Kurangnya dana dari pemerintah sehingga dalam penanggulangan bencana biasanya kurang efektif dan lambat di tangani oleh pemerintah BPBD (b) Kurangnya alat yang tersedia di instansi BPBD saat melaksanakan pertolongan pada saat terjadi bencana (c) Kurangnya SDM atau personil di bagian bidang kewaspadaan.

Kata Kunci : *Kewaspadaan BPBD Penanggulangan Bencana*

1. PENDAHULUAN

Kewaspadaan adalah usaha yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya bencana guna

menghindari jatuhnya korban jiwa kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat Kewaspadaan menghadapi suatu bencana adalah suatu

kondisi secara individu maupun kelompok yang kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana (Husna 2017) Terkait dengan usaha untuk melindungi warga negaranya kepada bencana Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kewaspadaan masyarakat dalam penanggulangan bencana tugas yang cukup penting karena akan berfaktor pada perbuatan masyarakat ketika bencana terjadi Jika masyarakatnya siapsiaga maka mereka akan melakukan persiapan sebelum bencana terjadi untuk mengurangi risiko bencana dan memilih perbuatan yang tepat saat bencana terjadi sehingga dapat mengurangi dampak buruk dari suatu bencana Kewaspadaan sangat berkaitan dengan pengetahuan mengenai suatu bencana itu sendiri Pengetahuan dan sikap menjadi indikator pertama untuk mengukur kewaspadaan masyarakat kepada bencana Pengetahuan kepada bencana merupakan alasan utama seseorang untuk melakukan kegiatan perlindungan atau usaha kewaspadaan yang ada (Dodon 2013).

Pengetahuan masyarakat mengenai bencana akan memfaktori sikap masyarakat pada saat bencana Pengetahuan dan sikap masyarakat kepada bencana dapat dilihat dengan pengetahuan masyarakat kepada berbagai perbuatan kewaspadaan yang seharusnya dilakukan Masyarakat akan mengambil perbuatan yang tepat jika pengetahuan meskipun dalam keadaan darurat Pengelolaan bencana di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Berlakunya undang-undang tersebut diharapkan manajemen kepada penanggulangan bencana menjadi lebih baik dan optimal Penanggulangan bencana sangat diperlukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan Usaha penanggulangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional pada suatu negara Usaha tersebut meliputi

proses tahapan yaitu; usaha penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana atau yang dikenal dengan pra-bencana usaha yang dapat dilakukan yaitu mitigasi dan kewaspadaan Sedangkan usaha yang dilakukan ketika bencana terjadi ataupun setelah terjadinya bencana yang disebut pasca bencana Usaha yang dapat dilakukan saat bencana terjadi adalah tanggap darurat/respon dan ketika pascabencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah menjadi elemen dan stakeholder utama yang kuasa dan tanggung jawab kepada penyelenggaraan penanggulangan bencana (Samad 2018) Aparatur pemerintah khususnya BPBD Kabupaten Samosir tugas penting dalam mengawasi dan penyuluhan desa tangguh bencana dalam pemberian pengetahuan Tetapi yang kita tahu masyarakat kurang sadar fenomena yang terjadi dan masih kurangnya kesadaran dan kapasitas dalam menambah tugas serta masyarakat masih belum bertugas aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik saat pra bencana bencana dan pascabencana Hasil observasi yang dilakukan di BPBD Kabupaten Samosir diperoleh informasi bahwa tugas BPBD dalam kewaspadaan penanganan bencana di Kabupaten Samosir belum maksimal dilakukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada masih kurang diakibatkan kurangnya pelatihan pelatihan kewaspadaan dalam penanggulangan bencana Kurangnya Sumber Daya Manusia ini menyebabkan BPBD Kabupaten Samosir belum peta rawan bencana yang akan diinformasikan ke masyarakat secara luas

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam halaman 4 yaitu : Kewaspadaan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menghindari bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna

Kewaspadaan adalah usaha yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan masyarakat atau proses kegiatan yang dilakukan untuk menghindari bencana melalui pengorganisasian melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna yaitu: Rencana kontinjensi yaitu suatu rencana kedepan dalam situasi yang belum pasti dimana skenario dan tujuan sudah disetujui perbuatan manajerial dan teknis ditentukan dan rencana tanggapan disusun Sistem peringatan dini yaitu proses kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang Rencana kesiapan yaitu merencanakan dan mengambil perbuatan untuk menjamin bahwa sumberdaya yang diperlukan akan tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat yang sudah diperkirakan sebelumnya dan bahwa ada kapasitas untuk menggunakan sumberdaya tersebut Adapun perbuatan yang dilakukan masyarakat dan perorangan untuk melakukan perbuatan dalam menghadapi situasi bencana secara cepat dan efektif yaitu; Tujuan kesiapan bencana adalah untuk meminimalisir faktor-faktor yang merugikan dari satu bahaya lewat perbuatan-perbuatan berjaga yang efektif dan untuk menjamin secara tepat organisasi yang tepat dan efisien serta pengiriman respon emergensi yang menindaklanjuti dampak dari satu bencana Bentuk-bentuk kesiapan bencana terdapat beberapa bentuk utama yang tercakup dalam kesiapan bencana yaitu; Perencanaan melalui semua aktivitas yang dirancang untuk mempromosikan kesiapan bencana tujuan yang paling utama adalah rencana-rencana yang siap yang sudah disepakati yang dapat diimplementasikan dan untuk menciptakan komitmen dengan berdasarkan sumber-sumber daya yang relatif terjamin Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 angka 1

yaitu: Bencana adalah kejadian atau rangkaian kejadian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang diakibatkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kejadian atau proses kejadian yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi tsunami gunung meletus banjir kekeringan angin topan dan tanah longsor Banjir adalah kejadian yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan banjir diakibatkan volume air di suatu badan air seperti sungai dan danau meluap karena curah hujan yang tinggi dan tidak lancarnya jalan air yang dikarenakan oleh sampah-sampah Gunung meletus merupakan kejadian yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi Angin topan adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit Tanah longsor adalah suatu kejadian geologi yang terjadi karena pergerakan batuan atau tanah dengan berbagai tipe dengan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kejadian atau proses kejadian nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi gagal modernisasi epidemis dan wabah penyakit Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain pengoperasian kelalaian atau kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi dan industry Epidemik Wabah dan Kejadian Luar Biasa merupakan ancaman yang diakibatkan oleh penyakit menular yang berjangkit di daerah tertentu Beberapa wabah penyakit yang pernah terjadi di Indonesia yang masih harus di waspadei antara lain demam berdarah malaria flu burung busung lapar dan HIV/AIDS

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh kejadian atau proses kejadian yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial atau kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror Aksi teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga membuat suasana teror atau rasa takut kepada orang secara meluas atau membuat korban yang bersifat massal dengan cara merampaskemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda mengakibatkan kerusakan atau kehancuran kepada objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional Konflik sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanandan tata tertib sosial yang ada yang di picu oleh kecemburuan sosial budaya dan ekonomi yang biasanya di kemas sebagai pertentangan antar suku ras dan agama Tahap Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Peringatan Dini Peringatan dini adalah proses kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 46 Ayat 2 dilakukan melalui: Pengamatan gejala bencana Analisis hasil pengamatan gejala bencana Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana Pengambilan keputusan oleh masyarakat Kewaspadaan Kewaspadaan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menghindari bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna Membangun kewaspadaan adalah unsur penting namun mudahdilakukan karena menyangkut sikap dan mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat Kewaspadaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam

menghadapi datangnya suatu bencana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 45 ayat 1 dan 2 yaitu; Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedarurat bencana Pengorganisasian pembentukan dan pengujian sistem peringatan dini Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar Penyiapan lokasi evakuasi Penyusunan data akurat informasi dan pemutakhiran prosedur cepat tanggap darurat bencana Penyediaan dan penyiapan bahan barang dan bahan peralatan untuk pemberian pemulihan prasarana dan sarana Mitigasi Mitigasi adalah proses usaha untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana Mitigasi bencana adalah usaha untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkanakibat suatu bencana Dari batasan ini sangat jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan keseluruhan melalui berbagai usaha dan pendekatan antara lain: Pendekatan struktural Mitigasi struktural adalah bentuk mitigasi yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dalam mengurangi dampak negtif banjir Pendekatan Administratif Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana khususnya ditahap mitigasi Pendekatan Manusia adalah bentuk dimana secara manusia ditujukan untuk membuat manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana Untuk ituperilaku dan cara hidup manusia harusdapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya Tanggap Darurat Bencana Tanggap darurat bencana adalah proses kegiatan yang dilakukan dan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban harta

benda pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan pengurusan pengungsi penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana

Sedangkan tanggap darurat yaitu kegiatan memobilisasi dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengkonsolidasi diri melalui penyediaan sarana dan prasarana korban bencana alam Pasca Bencana Setelah terjadinya bencana dan selesainya masa tanggap darurat diharapkan korban bencana atau pengungsi kembali ke rumah/ tempat asal dimana mereka tinggal Dalam hal memungkinkan tidak bisa kembali bisa ditempuh jalan lain misalnya melalui relokasi ke tempat lain yang aman secara fisik maupun nonfisik Rehabilitasi Rehabilitasi adalah perbaikan dan penanganan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah setelah bencana dengan tujuan utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah setelah bencana Rekonstruksi Rekonstruksi adalah membangun kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan tujuan utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian sosial dan budaya tegaknya hukum dan ketertibandan timbulnya tugas aktif masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah setelah bencana Menurut Nurjannah (2013:34) terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana yaitu : Sosialisasi Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan dan memaparkan bagaimana cara menghindari terjadinya bencana Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam proses transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat Kontinjensi Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang dimungkinkan akan terjadi tetapi mungkin juga tidak akan terjadi Rencana kontinjensi

adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan strategi yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan jika keadaan yang dimungkinkan tidak terjadi Gladi Lapang Pada dasarnya gladi lapang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang nyata dengan maksud untuk menguji Gladi lapang tanggap bencana merupakan alat atau instrument untuk menguji tingkat pengetahuan pemahaman respon dan perbuatan warga ketika akan saat dan pasca terjadi bencana Selanjutnya Munadi (2016:14) menyatakan bahwa terdapat dua faktor penghambat yang memfaktori Penanggulangan Bencana Daerah Faktor faktor tersebut adalah faktor eksternal dan internal Faktor eksternal yang memfaktori Penanggulangan Bencana Daerah adalah kapasitas masyarakat kepercayaan pribadi fasilitas dan infrastruktur sumber pendanaan sedangkan faktor internal meliputi personil berdedikasi (SDM) anggaran dan partisipasi Oleh karenanya penting mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal pada pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan bencana.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subyek penelitian misalnya perilaku persepsi motivasi perbuatan dll secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah Pada metode penelitian deskriptif menurut Moleong (2011:11) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar dan bukan angka-angka Selain itu semua yang dikumpulkan perkiraan menjadi kunci kepada apa yang sudah

diteliti Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut Data tersebut berasal dari naskah wawancara catatan lapangan foto videotape dokumen pribadi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Metode penelitian kualitatif ini digunakan dalam penelitian karena metode ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana kewaspadaan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kepada penanggulangan bencana di Kabupaten Samosir Karena penelitian ini menitikberatkan data yang melibatkan subjek dan objek informasi data yang didapat Data tersebut dapat berupa naskah wawancara catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Penanggulangan Bencana di Kabupaten Samosir Untuk mewujudkan Kabupaten Samosir yang tangguh kepada bencana maka perlu diawali dengan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana sebagai satuan terkecil dari Kabupaten/Kota Sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi dan kewaspadaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tepat terarah dan terpadu antara Pemerintah Daerah masyarakat dan dunia usaha usaha mencegah bencana dan/atau meminimalkan dampak bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Samosir Aparatur pemerintah khususnya BPBD Kabupaten Samosir tugas penting dalam mengawasi dan penyuluhan desa tangguh bencana dalam pemberian pengetahuan Tetapi yang kita tahu masyarakat kurang sadar fenomena yang terjadi dan masih kurangnya kesadaran dan kapasitas dalam menambah tugas serta masyarakat masih belum bertugas aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik saat pra bencana bencana dan pasca bencana Selama ini banyak kejadian bencana yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang belum sadar akan dampaknya kepada potensi bencana Usaha

penanggulangan bencana di Kabupaten Samosir perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan untuk menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah yang sering terjadi bencana Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan strategi dan operasi secara Nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang terjadi maka Didirikannya BPBD setidaknya menjadi bukti bahwa pemerintah Kabupaten Samosir serius dalam penanggulangan bencana yang sering melanda Kabupaten Samosir Perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah Usaha penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD merupakan kegiatan atau peraturan dalam penanggulangan bencana dapat diklasifikasikan bahwa BPBD Kabupaten Samosir sebelum terjadinya bencana melakukan rapat kilat bersama Bupati untuk membentuk satu komando apakah itu dari TNI POLRI atau BPBD sendiri Jadi pada saat terjadi bencana maka semua tim yang sudah di bentuk langsung mengevakuasi sesuai dengan tugasnya masing-masing Di dalam penanggulangan bencana harus terlebih dahulu mendirikan tenda/posko sesuai dengan yang bertanggung jawab atau yang diamankan pada saat rapat misalnya dapur umum itu bertanggung jawab dari dinas sosial penanganan kesehatan yang bertanggung jawab yaitu dinas kesehatan dan PMI masalah kendaraan di tangani oleh dinas perhubungan Setelah terjadi bencana dan semua data dalam posko terkumpul barulah dilakukan perbuatan selanjutnya Dalam posko ada data yang mengungkap bahwa sekian yang di efakuasi dan luka itu semua sudah ditangani secara profesional sehingga pada saat menolong itu semua tidak acak-acakan atau hanya sekedar

menolong saja Dalam melakukan tugas penanggulangan bencana memang dibutuhkan kerjasama dengan instansi yang ada di daerah agar semua masalah yang terkena bencana dapat terselesaikan sesuai dengan harapan Adapun usaha yang terstruktur dilakukan BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Samosir dalam menghindari segera terjadinya dan kemungkinan tidak terjadinya bencana di Kabupaten Samosir sesuai dengan pendapat di atas yaitu : Sosialisasi Kegiatan sosialisasi ini dilakukan yang bertempat di Kantor BPBD dengan beberapa Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Kegiatan kewaspadaan ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya bencana di bulan Desember atau pada saat terjadinya hujan lebat Kegiatan sosialisasi ini melibatkan semua instansi yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik itu pemerintah daerah non pemerintah dan selain itu masyarakat Kabupaten Samosir juga hadir dalam acara sosialisasi dalam acara kewaspadaan dan dalam penanggulangan bencana terutama daerah yang rawan terjadinya bencana yang ada di Kabupaten Samosir Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana yang akan terjadi di Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan sosialisasi kewaspadaan menghadapi bencana Kegiatan ini biasanya dilakukan hanya sekali dalam setahun sebelum terjadinya bencana Kontinjensi Perencanaan kontinjensi juga dimaksud suatu proses perencanaan kedepan dalam keadaan yang tidak menentu Perencanaan kontinjensi pada kewaspadaan bencana yaitu suatu proses yang mengarah pada suatu kesiapan dan kemampuan untuk memperkirakan kejadian bencana sehingga dapat mencegah bencana mengurangi dampak bencana dan memulihkan diri dari dampak Pada saat ada tanda-tanda akan terjadinya bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) di setiap

kecamatan Aktivitas rencana kontinjensi dilakukan setelah terdapat tanda-tanda peringatan dini akan datangnya ancaman bencana yang diakibatkan melimpahnya air sungai atau meluapnya genangan air yang diakibatkan hujan yang terus menerus selama beberapa hari yang menyebabkan genangan air Gladi Lapangan Adapun maksud diadakannya gladi lapangan adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewaspadaan kebencanaan baik di tingkat masyarakat maupun pemerintahan Desa/Kelurahan Mendorong peningkatan kapasitas warga dan pemerintah Desa/kelurahan dalam melakukan perbuatan antisipasi menghadapi bencana dan Memberikan keterampilan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan dalam menghadapi bencana Selanjutnya mengenai fase dalam gladi lapangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Samosir dapat dibagi menjadi beberapa fase yaitu: Fase I: Kejadian bencana diumumkan oleh kepala daerah berdasarkan masukan dari BPBD Petunjuk komandan tanggap darurat Komandan tanggap darurat menyusun komando tanggap darurat Fase II: Komando tanggap darurat menjalankan operasi tanggap darurat selama masa tanggap darurat Fase III: Selesai masa tanggap darurat Sebelum melakukan simulasi terlebih dahulu harus diketahui mengenai tanggap darurat dalam situasi kebencanaan Dalam penanggulangan bencana diprioritaskan penyelamatan jiwa dan perbaikan sarana prasarana Strategi penanganan darurat bencana merupakan cara untuk mencapai tujuan tanggap darurat yang telah ditetapkan.

Strategi harus mampu mewartakan kegiatan yang akan dilakukan masing-masing sektor sesuai dengan sifat/karakteristik bidang tugas sektor Faktor Penghambat Internal dan Eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Samosir Pelaksanaan proses Penanggulangan Bencana tentu saja tidak mulus didalamnya pasti ada faktor

penghambat dalam menambah kualitas Penanggulangan Bencana Menurut Munadi (2016:14) terdapat dua faktor penghambat yang memfaktori Penanggulangan Bencana Daerah Faktor faktor tersebut adalah faktor ekternal dan internal Faktor ekternal yang memfaktori Penanggulangan Bencana Daerah adalah kapasitas masyarakat kepercayaan pribadi fasilitas dan infrastruktur sumber pendanaan sedangkan faktor internal meliputi personil berdedikasi (SDM) anggaran dan partisipasi Oleh karenanya penting mengevaluasi faktor-faktor internal dan ekternal pada pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan bencana Berdasarkan pendapat di atas dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada beberapa yang menjadi faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan bencana di Kabupaten Samosir yaitu: Faktor Penghambat External Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepada Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Samosir yaitu: Belum Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Belum meningkatnya kapasitas masyarakat yang dimaksud di sini adalah kapasitas masyarakat yang belum kapasitas yang tangguh untuk menghadapi terjadinya bencana dan mampu menangani kedaruratan terutama untuk menolong dirinya sendiri yang terkena dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Samosir usaha yang sistematis dalam penanggulanagan bencana khususnya bencana secara cepat dan tepat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan oleh Alat Penanggulangan Bencana Kurang Lengkap Alat penanggulangan bencana sebagai alat penunjang keberhasilan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Samosir Apabila alat yang dibutuhkan tidak lengkap atau tidak tersedia tidak tersedia maka dalam penanggulangan bencana tidak akan memadai Maka dari itu kurangnya alat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan

bencana yang terjadi di Kabupaten Samosir Alat yang ada di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) ini tidak lengkap atau tidak memadai untuk digunakan dalam penanggulangan bencana karena apabila ada terjadi bencana biasanya alat yang digunakan itu biasanya tidak kembali lagi di instansi tersebut Alat yang digunakan dalam penanggulangan bencana yang ada di instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir yaitu terdiri atas satu unit tenda pengungsi satu unit perahu karet satu mobil ambulance dan mobil serbaguna Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa peralatan yang di miliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu tidak lengkap untuk digunakan pada saat penanggulangan bencana Kurangnya Dana Salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Samosir ini yaitu kurangnya dana dari pemerintah sehingga dalam penanggulangan bencana itu biasanya kurang memadai Jadi penanggulangan bencana biaya operasionalnya saat tanggap darurat terlebih dahulu dapat dimanfaatkan dana SKPD masing-masing Jika dana kurang memadai dimintakan kepada provinsi melalui Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) provinsi Selanjutnya jika belum bias diatasi maka bisa diusulkan dana siap pakai "ON CALL" dapat di minta melalui BNPB setelah ada pernyataan Tanggap Darurat secara resmi dan tertulis dari Bupati Faktor Penghambat Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepada Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Samosir yaitu: 1 Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Samosir ini yaitu kurangnya personil terutama di bagian seksi Kewaspadaan bahkan sekaran kepala seksinya belum ada Dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Samosir i kurangnya personil terutama di bagian seksi Kewaspadaan yang sekarang kepala seksinya belum ada merupakan

faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan bencana Jumlah personil yang ada di instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir yaitu 26 orang secara keseluruhan Adapun jumlah personil di bagian Bidang Kewaspadaan dan Pencegahan yaitu terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang kepala bidang pencegahan dan kewaspadaan kepala seksi pencegahan dan Kepala seksi kewaspadaan yang masih kosong Jadi di dalam melakukan penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus membentuk atau menambah personil untuk bagian pencegahan dan kewaspadaan terutama di bagian seksi kewaspadaan agar pada saat terjadi bencana di Kabupaten Samosir.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan beberapa informan penelitian di lokasi dan beberapa dokumentasi dapat disimpulkan bahwa: Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Samosir sudah berjalan dengan bagus karena usaha-usaha BPBD dilakukan setiap tahunnya dan sudah melibatkan pemerintah Kabupaten Samosir dan masyarakat kabupaten Samosir yang sering terkena bencana setiap tahunnya Usaha-usaha BPBD Kabupaten Samosir adalah usaha yang sudah tersusun secara struktur dan dilakukan untuk menambah pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana yang akan segera terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi Adapun usaha-usaha BPBD yang sudah tersusun secara struktur yaitu: (a) Sosialisasi (b) Kontinjensi dan (3) Gladi Lapangan Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui faktor penghambat BPBD dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Samosir yaitu (a) Kurangnya dana dari pemerintah sehingga dalam penanggulangan bencana biasanya kurang efektif dan lambat di tangani oleh pemerintah BPBD (b) Kurangnya alat yang

tersedia di instansi BPBD khususnya alat yang digunakan pada saat melaksanakan pertolongan pada saat terjadi bencana (c) Kurangnya SDM atau personil di bagian bidang kewaspadaan atau pencegahan bencana yang ada di BPBD Kabupaten Samosir

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka adapun saran dalam penelitian ini adalah: Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya dan tetap konsisten dalam menjaga prinsip BPBD mengenai bencana yang terjadi di Kabupaten Samosir Usaha BPBD yang telah dilakukan agar lebih diperhatikan dan dikembangkan kepada masyarakat Kabupaten Samosir khususnya kepada daerah dan masyarakat yang sering terjadi bencana yang ada di Kabupaten Samosir

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Siap Siaga Menghadapi Bencana Alam (Bandung 3 2013)
- Annisa Kurnia Shalihat Pola Adaptasi Masyarakat Kepada Banjir di Masyarakat Perumahan Genuk Indah Kota Semarang Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi 2015) h 22-25
- M Burhan, Bungin. 2008. Penelitian Kualitatif Cet II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Burhan, Bungin. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Cet: 8 Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Departemen Sosial RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- Departemen Sosial RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Jakarta: Pusat Penyuluhan

- Sosial 2007)
- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Departemen Sosial RI Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial 2003)
- Departemen Sosial RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Husaini, Usman. 2008. Metodologi Penelitian Sosial Cet 1. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Irwan, Soehartono. 2008. Metode Penelitian Sosial Cet VII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kementerian Sosial R I Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana Cet I. 2011; Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Kementerian Sosial R I Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana (Cet I: Jakarta 2011) Kementerian Sosial RI Himpunan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana Bidang Sosial
- Lexy, J Moleong. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya
- Nurjannah dkk. 2009. Manajemen Bencana Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Bandung: Alfabeta
- Sekretariat Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi Panduan Pengenalan Karakteristik bencana dan Usaha Mitigasi di Indonesia
- Widiyany, Nurrahmah. 2011. Kewaspadaan Masyarakat dalam Menghadapi Cet I; Jakarta